

Jurnal MODERAT, Volume 5, Nomor 4, November 2019, hlm 366-378 ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat> ISSN: 2622-691X (online)

ANALISIS PENGELOLAAN KELOMPOK BERMAIN (KB) ANAK USIA DINI DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

ANDI UCENG

Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, Indonesia

E-mail : andiuceng@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami manajemen pendidikan anak usia dini di Kabupaten Sedenreng Rappang. Variabel yang dianalisis planning, implementasinya. Metode survei untuk mendapatkan fakta dan informasi faktual. Populasi penelitian mencakup semua kelompok studi di bawah Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini. sampel di tiga kecamatan (Watang Pulu, Panca Rijang, dan Tellu LimpoE) sebagai lokus dari mana 65 anggota diambil. Data dikumpulkan dalam empat cara : interview, observasi, kuisisioner dan analisis data sekunder. Data diolah dan dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu menafsirkan data yang dikumpulkan, fakta dan informasi. Data kemudian disajikan dalam tabel frekuensi dan diikuti oleh deskripsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan selalu dikeluarkan sebagai bagian dari manajemen pendidikan anak usia dini di Kabupaten Sidenreng Rappang. Ini terbukti dari keberadaan data yang akurat dan pengumpulan informasi. Kegiatan operasional selalu dilakukan. Ini didukung oleh koordinasi di pemerintah daerah, kualitas dan kualitas infrastruktur dan fasilitas serta anggaran operasional untuk kegiatan. Ini juga didukung oleh pengawasan langsung dan tidak langsung yang sering dilakukan oleh staf.

Kata Kunci: *Kebijakan, Pendidikan Anak, Manajemen*

PENDAHULUAN

Reformasi pembangunan nasional yang menyertai berlakunya asas desentralisasi mempunyai visi mewujudkan masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan tersebut dapat tercapaidengan dukungan manusia

Indonesia yang sehat, mandiri, beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum danlingkungan, menguasai pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerjayang tinggi dan berdisiplin.

Salah satu program pendidikan yang bersifat nasional adalah Pendidikan Kelompok Bermain Anak Usia Dini. Dasar hukumnya adalah

Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional Bab VI Bagian Ketujuh pasal 28 yang berbunyi :

1. Kelompok bermain anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.
2. Kelompok bermain anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan, non formal, dan/atau informal.
3. Kelompok bermain anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudatul Athfal (RA) atau bentuk lain yang sederajat.
4. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.

Kabupaten Sidenreng Rappang jumlah tenaga pendidikan (tendik) untuk mendidikan anak usia dini telah mencapai 43 kelompok, dengan jumlah warga belajar 1027 anak tersebar pada 11 kecamatan, 6 diantaranya di bawah binaan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sidenreng Rappang.

Hasil pengamatan awal yang dilakukan peneliti pada tiga Kelompok Bermain (KB) dan dua TK (tanggal 5 – 8 Maret 2019) terlihat adanya pengelolaan kelompok bermain anak usia dini di Kabupaten Sidenreng Rappang belum optimal dan belum sesuai dengan yang diharapkan. Indikasinya dapat dilihat dari beberapa

hal diantaranya (1) Pengelolaan dilakukan secara spontanitas dan tanpa perencanaan dan perangkat pembelajaran, (2) Sarana Pembelajaran sangat minim, (3) Pengajar dan Pengelolaan tidak memiliki dasar pemahaman tentang anak usia dini dan tidak memiliki latar belakang pendidikan anak usia dini, (4) system evaluasi yang diterapkan belum dilakukan secara baik, bahkan cenderung belum dilaksanakan sehingga lembaga atau kelompok pengelola kelompok bermain anak usia dini tidak memperoleh masukan perkembangan dan kemajuan yang tercapai.

KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian Fungsi Manajemen

Beberapa pendapat pakar tentang arti manajemen yang dikutip dari Syafii, dkk (1999:49) diuraikan sebagai berikut :

- a. Terry (1964) mengungkapkan bahwa manajemen adalah suatu proses khusus yang terdiri perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemamfaatan sumberdaya manusia lainnya.
- b. Millet (1954) mengungkapkan bahwa manajemen adalah proses kepemimpinan dan pemberian arah terhadap pekerjaan yang

terorganisir dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.

Dari uraian diatas, maka manajemen merupakan suatu proses pengendalian sumber daya organisasi dalam upaya mencapai tujuan yang dikehendaki. Manajemen merupakan suatu ilmu yang sangat kompleks.

Sejalan dengan hal tersebut, Hasibuan (2002 : 3) (Sellang, Kamaruddin; Ahmad, Jamaluddin; Mustanir, 2019) mengungkapkan bahwa : “*fungsi manajemen menurut Terry adalah Planning (perencanaan), Organizing (pengorganisasian), Aktuating (pelaksanaan), dan Controlling (pengawasan)*”. Dari uraian diatas, maka variabel yang penting dikaji dalam kegiatan pengelolaan adalah perencanaan, pelaksanaan (*organizing dan actuating*) serta evaluasi (*controlling*).

Perencanaan merupakan fungsi yang mendasar dan utama dari semua fungsi-fungsi manajemen, kerna selain sebagai fungsi yang pertama dan utama, menentukan bagaimana fungsi-fungsi manajemen lainnya yang akan dilaksanakan atau merupakan dasar, landasan atau titik tolak dalam melaksanakan tindakan-tindakan manajerial.

Silalahi (199:137) (Mustanir, Justira, Sellang, & Muchtar, 2018)(Mustanir & Darmiah, 2016) mengungkapkan bahwa : Perencanaan memberikan tujuan dan

arah organisasi, menentukan apa yang harus dikerjakan (*what must be done*), mengapa harus dikerjakan (*why must be done*), dimana dikerjakan (*where will be done*), kapan kapan akan dikerjakan (*when will be done*), siapa yang mengerjakan (*who will do it*), dan bagaimana hal tersebut akan dikerjakan (*how will it be done*). Dalam perencanaan, manajer dapat menentukan tujuan organisasi dan lebih spesifik diungkapkan bahwa dalam upaya ini manajer menentukan apa yang akan dikerjakan dalam pencapaian suatu tujuan.

2. Tingkat Manajemen Perencanaan

Nawawi dan Hadari (1994:37) menguraikan bahwa : “Perencanaan adalah proses menetapkan keputusan mengenai pekerjaan atau kegiatan yang akan dilaksanakan untuk jangka waktu tertentu di masa depan yang terarah pada suatu tujuan tertentu”.

Dalam pengambilan keputusan tersebut upaya dilakukan sehingga pelaksanaan kelak dapat berjalan secara sempurna. Pembuatan rencana dilakukan dengan menghimpun data mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan bidang kerja/kegiatan yang akan dijelajahnya (Kholifah R & Mustanir, 2019).

Gambar diatas menunjukkan bahwa pembuatan rencana sebagai sebuah keputusan harus dimulai dari upaya menghimpun. Agar data diperoleh secara lengkap sekurang-kurangnya

perlu dilakukan pencatatan. di samping tidak mustahil harus dilakukan kegiatan penelitian, apabila data belum dimiliki. Data yang diperlukan harus mutakhir, sehingga diperlukan juga usaha mengikuti perkembangannya dalam berjalannya waktu, agar perencanaan tidak bertolak dari atau dirumuskan berdasarkan data yang keliru, tidak lengkap dan kedaluarsa. Usaha berdasarkan data yang paling sederhana dapat dilakukan melalui kegiatan orientasi/pengenalan.

Motivasi diperlukan dalam suatu organisasi kerna dapat mendorong kinerja personil. Tujuan ini dapat dicapai jika pemimpin suatu organisasi memahami dengan tepat, jenis-jenis motivasi dalam rangka mendorong aparat untuk bekerja dan memberikan intensif terhadap hasil pekerjaan. Disisi lain aparat dapat menghindarkan diri untuk berperilaku pada jenis motivasi negatif yang menyebabkan terhambatnya tujuan organisasi.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perencanaan

Hasibuan (2002 : 157) (Mustanir, Ramadhan, et al., 2019)(Mustanir, Madaling, et al., 2019)mengungkapkan bahwa : Teori Herzberg menekankan pada dua faktor kebutuhan manusia. Faktor pertama adalah kebutuhan akan sehatan atau kebutuhan akan pemeliharaan pada ketenteraman badaniah sedang faktor kedua adalah faktor pemeliharaan menyagkut pada kebutuhan psikologis seseorang”.

Faktor pemeliharaan merupakan faktor-faktor yang berhubungan dengan hakikat pekerja yang ingin memperoleh ketenteraman badaniah. Kebutuhan ini akan berlangsung terus menerus, sehingga faktor-faktor tersebut bukan saja sebagai motivator, akan tetapi merupakan suatu keharusan bagi perusahaan, pemeliharaan yang berkaitan dengan kebutuhan psikologi meliputi kondisi yang harus dipenuhi untuk menimbulkan rasa kepuasan.

Dari uraian diatas, maka motivasi menurut teori Herzberg menekankan pada dua hal yaitu secara intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi instrinsik merupakan pendorong perilaku yang bersuber sebagai individu, berupa kesadaran mengenai pentingnya makna pekerjaan dan memungkinkan seseorang mampu mencapai suatu tujuan, maupun karena memeberikan harapan tertentu yang sifatnya positif kemasa depan. Faktor instrinsik tersebut berupa pengakuan, tanggung jawab, kemajuan pekerjaan.

Siagian (2001 : 292) menguraikan bahwa : menurut teori harapan, motivasi merupakan akibat dari suatu hasil yang ingin dicapai oleh seseorang dan perkiraan yang bersangkutan bahwa tindakannya akan mengarah kepada hasil yang diinginkannya itu. Dalam teori ini dikemukakan bahwa jika seseorang mengiginkan suatu dan harapan untuk memperoleh sesuatu yang cukup besar, maka yang bersangkutan

akan sangat terdorong dalam memperoleh hal yang diinginkannya tipis, maka motivasinya pun untuk berupaya akan menjadi rendah.

Selanjutnya Siagian (2001 : 294) menguraikan bahwa : dalam teori kaitan imbalan dengan prestasi, motivasi dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal faktor eksternal. Kepemimpinan merupakan rangkaian menggerakkan, membimbing dan mengarahkan serta mengawasi orang lain dalam berbuat sesuatu, baik secara perorangan maupun bersama-sama. Seluruh kegiatan itu dapat disebut sebagai usaha mempengaruhi perasaan, pikiran dan tingkah laku orang lain ke arah pencapaian suatu tujuan.

Dalam pemberian pelayanan public, maka birokrasi hendaknya melakukan kebijakan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu norma dan etika yang dianut oleh masyarakat yang hendak dilayani juga merupakan salah satu hal yang harus dipertimbangkan. Dengan demikian pencapaian tujuan pelayanan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

1) Pelayanan Pendidikan

Dalam kehidupan suatu bangsa, pendidikan memegang peranan penting dalam menjamin kelangsungan hidup masyarakat. Karena pendidikan merupakan wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Disisi lain perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut perkembangan akan system

pendidikan. Mutu pendidikan yang berkualitas akan mendukung terciptanya manusia yang cerdas dan berkehidupan yang damai, terbuka dan berdemokrasi serta mampu bersaing secara terbuka di era global sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh warga Negara Indonesia.

Pemerataan fasilitas pendidikan keseluruhan wilayah tanah air tidak saja ditansia dengan pembangunan gedung sekolah. Tetapi juga upaya peningkatan mutu pendidikan juga dilaksanakan berkesinambungan. Hal ini dilakukan dengan jalan memeberikan pelatihan penguasaan materi serta penggunaan media pengajaran kepada guru bahkan sampai di desa-desa.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, strategi pelaksanaan pendidikan harus ditata sesuai dengan tuntutan masyarakat. Sidi dalam Mulyasa (2003:6) mengungkapkan bahwa : Penataan kebijakan pendidikan nasional direkonstruksi dengan mengamati empat isu yaitu : peningkatan mutu pendidikan, peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan, peningkatan relevansi pendidikan, dan pemerataan pelayanan pendidikan”.

Adapun fungsi pendidikan nasional diungkapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu mengembangkan dan membentuk watak peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,

bertujuan untuk berkembangannya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta tanggung jawab.

Dalam kebijakan desentralisasi, pelaksanaan pendidikan direncanakan sesuai dengan kebutuhan, kondisi dan potensi daerah. Sehingga setiap daerah dituntut untuk melakukan pembangunan dibidang pendidikan secara terencana.

2). Manajemen Pendidikan

Dalam pengelolaan pendidikan konsep dasar manajemen merupakan suatu dasar dalam pelaksanaannya. Sehingga manajemen atau pengelolaan merupakan komponen integral dan tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan secara keseluruhan. Alasannya tanpa manajemen tidak mungkin tujuan pendidikan dapat di wujudkan secara optimal, efektif dan efisien.

Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republic Indonesia tahun 1945 yang berakar nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan Tanggapan terhadap tuntutan perubahan zaman. Sedangkan sistem pendidikan nasional

adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Fungsi-fungsi manajemen juga diaplikasikan dalam manajemen pendidikan. Perencanaan yang merupakan proses pengambilan keputusan tentang tindakan yang akan dilakukan dalam kegiatan pendidikan.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kelompok belajar yang terlibat dalam pengelolaan kelompok bermain (KB) anak usia dini. Sedangkan sampel penelitian ditentukan secara Purposive Sampling yakni mengambil tiga kecamatan sebagai sasaran penelitian, yakni kecamatan Watang Pulu, kecamatan Panca Rijang, dan kecamatan Tellu Limpoe. Ketiga kecamatan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kecamatan Wattang Pulu mewakili kecamatan yang berada di ibukota kabupaten, kecamatan Panca Rijang mewakili kecamatan yang berada di bagian utara kota, sedangkan kecamatan Tellu Limpoe adalah kecamatan yang mewakili wilayah selatan ibukota kabupaten.

Tabel 1.
Sasaran Atau Objek Penelitian

No	Unit Kerja	Jumlah Objek
1.	Kecamatan Watang Pulu	8 Kelompok
2.	Kecamatan Pancarijang	3 Kelompok

3. Kecamatan Tellu limpoe	2 Kelompok
JUMLAH	13 Kelompok

Dari 13 kelompok yang dipilih, maka ditentukan sampel sebanyak lima orang dalam setiap kelompok. Kelima responden tersebut adalah ketua lembaga, sekretaris lembaga, bendahara dan dua tutor. Sehingga jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 65 orang.

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui empat tahap yaitu: Wawancara, Observasi, pembagian kuisioner, telaah dokumen.

Data yang telah dikumpulkan diolah dan dianalisis dengan teknik analisis deskriptif (deskriptive approach), yakni dengan cara melakukan interpretasi terhadap data, fakta dan informasi yang telah dikumpulkan. Analisis ini diperlukan untuk menganalisis variable yang dijelaskan dengan table persentasi jawaban atas pertanyaan akan diberikan nilai 1 (satu) sampai 4 (empat) kemudian hasil perjumlahan diberi skor dan setiap pertanyaan akan dibagi dengan jumlah responden sehingga diperoleh rata-rata skor setiap pertanyaan, sehingga akan

diperoleh rata-rata skor (nilai) sebagaimana rumus dibawah ini :

$$Skor = \frac{\sum fi}{N}$$

Keterangan :

Fi = Skor jawaban

N = jumlah responden

Analisis ini dimaksudkan agar temuan-temuan dari kasus-kasus yang terjadi dilokasi penelitian dapat dikaji lebih mendalam dan penomena yang ada dapat digambarkan lebih secara terperinci.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Rekapitulasi Pengelolaan Kelempok Bermain (KB) anak usia dini di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pengelolaan kelompok bermain (KB) anak usia dini dikaji pada variabel perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Untuk variabel perencanaan secara umum disajikan pada table 2 berikut :

Tabel 2.

Tanggapan Responden Secara Umum Variabel Perencanaan

Tanggapan	Frekuensi		Jumlah	Persentase	Ket
	Tabel 11	Tabel 13			
Selalu	34	47	81	62	
Sering	18	7	25	19	

Kadang	8	6	14	11	
Jarang	3	2	5	4	Selalu
Tidak Pernah	2	3	5	4	
Jumlah	65	65	130	100	

Sumber : Hasil Olahan Data Primer, 2019

Tabel diatas menunjukkan bahwa secara umum responden yang menganggap perencanaan kegiatan operasional kelompok berbain anak usia dini selalu dilaksanakan yaitu sebanyak 81 respoden (62%), terdapat 25 tanggapan respoden (19%), yang menganggap bahwa perencanaan kegiatan responden kelompok bermain anak usia dini sering dilaksanakan. Selanjutnya responden yang menganggap bahwa kadang-kadang dilaksanakan adalah sebanyak 14

((11%), sedang terdapat tanggapan jarang dan tidak pernah masing-masing sebanyak 5 (4%). Dari uraian tersesebut dapat diungkapkan bahwa secara umum perencanaan operasional selalu dilaksanakan. Dengan nilai prosentase tinggi sebesar 62% yang berada diantara nilai 61% - 89% menunjukkan bahwa indikator ini mendukung pengelolaan kelompok bermain anak usia dini. Analisis variabel pelaksanaan secara umum disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3

Tanggapan Responden Secara Umum Pada Variabel Pelaksanaan

Tanggapan	Frekuensi (F)	Persentase %	Ket
Selalu	99	30	
Sering	135	42	
Kadang	60	18	
Jarang	21	6	sering
Tidak Pernah	10	3	
Jumlah	325	100	

Sumber : Hasil Olahan Data Primer, 2019

Tabel di atas menunjukkan bahwa secara umum bahwa responden yang menganggap pelaksanaan kegiatan operasional kelompok bermain anak usia dini sering dilaksanakan yaitu sebanyak 135 responden (42%) dan terdapat 99 tanggapan responden (30%) yang menganggap bahwa pelaksanaan kegiatan operasional

kelompok bermain anak usia dini selalu dilaksanakan. Selanjutnya responden yang menganggap bahwa kegiatan pelaksanaan kadang-kadang dilaksanakan adalah sebanyak 60 (18%), SEdang terdapat tanggapan jarang pelaksanaan kegiatan operasional kelompok bermain anak usia dini dilaksanakan sebanyak 21

responden (6%) dan yang menganggap pelaksanaan kegiatan operasional kelompok bermain anak usia dini dilaksanakan sebanyak 10 (3%).

Dari usia tersebut dapat diungkapkan bahwa secara umum pelaksanaan prasional sering dilaksanakan. Dengan ini prosentase

tertinggi sebesar 42% yang berada diantara nilai 41% - 60% menunjukkan bahwa indikator ini mendukung pengelolaan kegiatan kelompok bermain anak usia dini.

Selanjut hasil analisa variable pengawasan secara umum disajikan pada tabel 4 berikut :

Tabel 4.

TanggapanRespoden Secara Umum Pada Variabel Pengawasan

Tanggapan	Frekuensi		Jumlah	Persentase %	Ket
	Tabel 21	Tabel 22			
Selalu	22	5	27	21	
Sering	29	32	61	47	
Kadang	8	22	30	23	selalu
Jarang	4	4	8	6	
Tidak Pernah	2	2	4	3	
Jumlah	65	65	130	100	

Sumber : Hasil Olah Data Primer, 2019.

Tabel diatas menunjukkan bahwa secara umum responden yang menganggap pengawasan kegiatan operasional kelompok bermain anak usia dini sering dilaksanakan yaitu sebanyak 60 responden (46%) dan terdapat 30 tanggapan responden (23%) yang menganggap bahwa pengawasan kegiatan operasional kelompok bermain anak usia dini kadang-kadang dilaksanakan. Selanjutnya responden yang menganggap bahwa kegiatan pengawasan selalu dilaksanakan adalah sebanyak 28 (22%), Sedang terdapat tanggapan jarang kegiatan pengawasan dilaksanakan sebanyak 8

responden (6%) dan yang menganggap pengawasan kegiatan operasional kelompok bermain anak usia dini tidak pernah dilaksanakan sebanyak 4 (3%).

Dari uraian tersebut dapat diungkapkan bahwa secara umum pengawasan operasional sering dilaksanakan . Dengan nilai prosentasi tertinggi sebesar 46 % yang berada diantara nilai 41% - 60% menunjukkan bahwa indikator ini mendukung pengelolaan kegiatan kelompok bermain anak usia dini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil olah data, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengelolaan kelompok bermain (KB) anak usia dini di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan bahwa perencanaan operasional selalu dilakukan. Hal ini didukung adanya kegiatan pengumpulan data dan informasi yang akurat.
2. Pengelolaan kelompok bermain (KB) anak usia dini di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan bahwa sudah berjalan sesuai program yang ditetapkan.
3. Pengelolaan kelompok bermain (KB) anak usia dini di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan bahwa pengawasan operasional sudah berjalan dengan baik. Hal ini ditunjang dengan pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung yang sering dilakukan oleh aparat.

DAFTAR PUSTAKA

- Durbin, Andrew J. (1990). *Essentials of management*. Chicago. South-western PublishingCo. West.
- Hasibuan, Malayu. (2002). *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Kholifah R, E., & Mustanir, A. (2019). *Food Policy and Its Impact on Local Food*. In *Proceeding*

ICOGLASS 2019 (pp. 27–38).
Jember: Universitas Muhammadiyah Jember.
Retrieved from <http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/ICOGLASS19/article/view/2465>

Mustanir, A., & Darmiah, D. (2016). *Implementasi Kebijakan Dana Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpo Kabupaten Sidenreng Rappang*. *Jurnal Politik Profetik*, 4(2), 225–238. Retrieved from <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/2749>

Mustanir, A., Justira, N., Sellang, K., & Muchtar, A. I. (2018). *Democratic Model On Decision-Making At Deliberations Of Development Planning*. *International Conference on Government Leadership and Social Science (ICOGLASS)*. *Demanding Governance Accountability and Promoting Democratic Leadership for Public Welfare Achievement*, 110 – 115. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/330090538_Democratic_Model_On_Decision-Making_At_Deliberations_Of_Development_Planning

- Manullang. (1984). *Administrasi Kepegawaian*, Jakarta, Masagung.
- Mustanir, A., Madaling, M., Uceng, A., Kasau, M. N. R., Barisan, B., & Andriani, D. (2019). *Karakteristik Kepemimpinan Lurah Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang. Jurnal Ilmiah Clean Government (JCG)*, 2(2), 145–172.
- Mustanir, A., Ramadhan, M. R., Razak, M. R. R., Lukman, L., Sapri, S., & Takhrim, T. (2019). *Peranan Camat dan Komunikasi Pemerintahan Terhadap Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang. Jurnal Ilmiah Clean Government (JCG)*, 2(2), 94–114.
- Sellang, Kamaruddin; Ahmad, Jamaluddin; Mustanir, A. (2019). *Strategi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik*. (Q. Media, Ed.) (1st ed.). Rappang: CV. Penerbit Qiara Media. Retrieved from https://play.google.com/store/books/details/Kamaruddin_Sellang_S_Sos_M_AP_STRATEGI_DALAM_PENIN?id=U06rDwAAQBAJ
- Mulyasa. (2002). *Manajemen Berbasis Sekolah*, Bandung, Remaja Rosda Karya.
- _____. (2003). *Kurikulum berbasis Kompetensi (Konsep, Karakteristik, dan Implementasi)*, Bandung, Remaja Rosda Karya.
- Kholifah R, E., & Mustanir, A. (2019). Food Policy and Its Impact on Local Food. In *Proceeding ICOGISS 2019* (pp. 27–38). Jember: Universitas Muhammadiyah Jember. Retrieved from <http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/ICOGISS19/article/view/2465>
- Mustanir, A., & Darmiah, D. (2016). *Implementasi Kebijakan Dana Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpo Kabupaten Sidenreng Rappang. Jurnal Politik Profetik*, 4(2), 225–238. Retrieved from <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/2749>
- Mustanir, A., Justira, N., Sellang, K.,

- & Muchtar, A. I. (2018). Democratic Model On Decision-Making At Deliberations Of Development Planning. *International Conference on Government Leadership and Social Science (ICOGLOSS). Demanding Governance Accountability and Promoting Democratic Leadership for Public Welfare Achievement*, 110 – 115. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/330090538_Democratic_Model_On_Decision-Making_At_Deliberations_Of_Development_Planning
- Mustanir, A., Madaling, M., Uceng, A., Kasau, M. N. R., Barisan, B., & Andriani, D. (2019). *Karakteristik Kepemimpinan Lurah Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang. Jurnal Ilmiah Clean Government (JCG)*, 2(2), 145–172.
- Mustanir, A., Ramadhan, M. R., Razak, M. R. R., Lukman, L., Sapri, S., & Takhrim, T. (2019). *Peranan camat dan Komunikasi Pemerintahan Terhadap Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang. Jurnal Ilmiah Clean Government (JCG)*, 2(2), 94–114.
- Sellang, Kamaruddin; Ahmad, Jamaluddin; Mustanir, A. (2019). *Strategi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik*. (Q. Media, Ed.) (1st ed.). Rappang: CV. Penerbit Qiara Media. Retrieved from https://play.google.com/store/books/details/Kamaruddin_Sellang_Sos_M_AP_STRATEGI_DALAM_PENIN?id=U06rDwAAQBAJ

- Nawawidan Hadari.(1994).*Ilmu Administrasi*, Ghalia Indonesia, Pontianak.
- Siagian, SP. (2001). *Manajemen Sumberdaya Manusia* , Jakarta, PT.Bumi Aksara.
- Silalahi, T. (1996).*Sumberdaya Manusia dalam Pembangunan*, Jakarta, Erlangga.
- Stoner, James A.F. (1989).*Manajemen*, Jakarta, Erlangga.
- Sujak. (1990).*Kepemimpinan Manajerial*, Depdibud, Jakarta.
- Syafii, I, K, dkk. (1999).*Ilmu Administrasi Publik*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Terry dan Winardi. (1986).*Asas-Asas Manajemen*, Bandung, Al Ummi.
- Umar, Husein. (2003). *Riset Sumberdaya Manusia Dalam Organisasi*, Jakarta, PT, Gramedia Pustaka Utama.
- Widodo, Joko. (2001).*Good Gavernence : Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas Dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*. Jakarta, Insan Cendekia.
- Winardi. (2002).*Azas-Azas Manajemen : Sebuah Tinjauan Umum*, Cetakan Pertama, Jakarta, Fakultas Ekonomi UI
- Dokumen**
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Keputusan
KementerianPendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan